



PEMERINTAH
KABUPATEN
TABANAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025



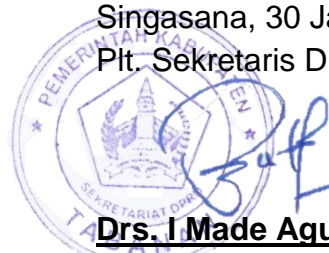
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini. Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan guna mewujudkan visi, misi dan penjabarannya sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2021 – 2026. Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam tahun 2025 baik mengenai keberhasilan, kegagalan maupun permasalahan yang yang dihadapi serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Terima kasih kami sampaikan atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian LKjIP ini dan kami menyadari bahwa LKjIP ini belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami buat, agar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan.

Singasana, 30 Januari 2025

Plt. Sekretaris DPRD Kab. Tabanan,



Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730814 199203 1 001



DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	4
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	10
1.4 Landasan Hukum.....	11
1.5 Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja.....	20
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	21
C. Capaian Kinerja Sasaran	37
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan	41
E. Analisis Efisiensi	42
F. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	44
3.1 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
LAMPIRAN	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan *legitimate* merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam rangka mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan harus selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat DPRD dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut dapat terwujud apabila Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil kinerja dengan baik dan terukur yang disusun menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.. Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan yang diceminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaiakn indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan diatur dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Keuangan Daerah.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan
- b. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi rapat anggota DPRD
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan

Dengan struktur dan pembagian tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan diharapkan mampu melaksanakan perannya secara optimal dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Keuangan Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan didukung oleh Sumber Daya Manusia, yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Berdasarkan data bulan Desember 2025 jumlah pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan : 103 Orang
 - a. PNS : 44 Orang
 - b. PPPK : 4 Orang
 - c. PPPK Paruh Waktu : 55 Orang
2. Jumlah PNS berdasarkan jabatan struktural
 - a. Eselon II/b : 0 Orang
 - b. Eselon III/a : 3 Orang
 - c. Eselon III/b : 0 Orang
 - d. Eselon IV/a : 1 Orang
3. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama : 2 Orang
4. Jumlah PNS berdasarkan golongan :
 - a. Golongan IV : 4 Orang
 - b. Golongan III : 34 Orang
 - c. Golongan II : 6 Orang
 - d. Golongan I : 0 Orang
5. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan :
 - a. S2 : 9 Orang
 - b. S1 : 24 Orang
 - c. Diploma : 0 Orang
 - d. SLTA : 11 Orang



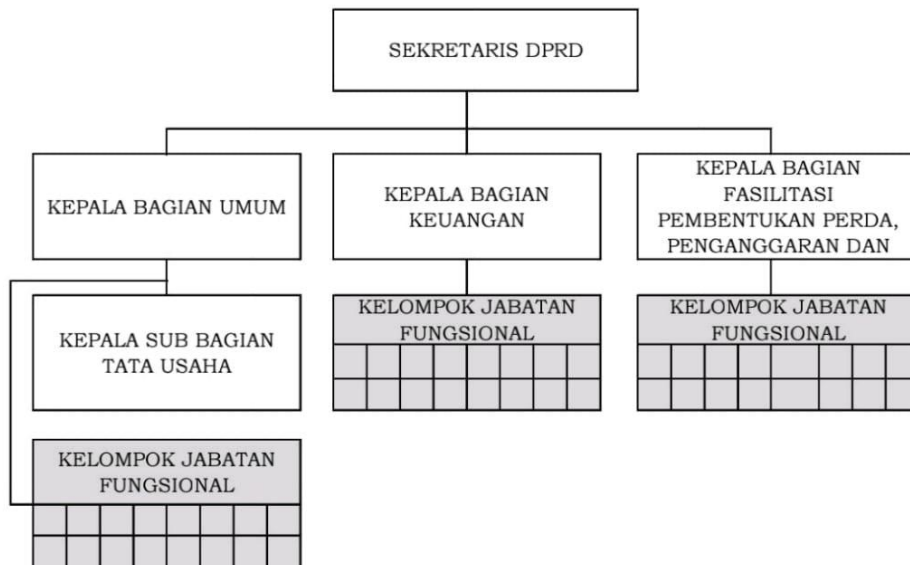
- e. SLTP : 0 Orang
- 6. Jumlah PPPK berdasarkan tingkat pendidikan :
 - a. S2 : 0 Orang
 - b. S1 : 0 Orang
 - c. Diploma : 1 Orang
 - d. SLTA : 1 Orang
 - e. SLTP : 2 Orang
- 7. Jumlah PPPK Paruh Waktu berdasarkan tingkat pendidikan
 - a. S2 : 0 Orang
 - b. S1 : 19 Orang
 - c. Diploma : 1 Orang
 - d. SLTA : 30 Orang
 - e. SLTP : 5 Orang

Berdasarkan uraian diatas Pejabat Struktural yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan berjumlah 5 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan Struktural	Nama	Pendidikan	Pangkat/Golongan
1	Plt. Sekretaris DPRD	Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si	S2	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Kepala Bagian Umum	Putu Juni Hendra Pratama, SE, M.AP	S2	Penata Tk. I (III/d)
3	Kepala Bagian Keuangan	I Putu Pande Ariawan, SE, M.Si	S2	Penata Tk. I (III/d)
4	Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	Ni Wayan Dentik Suryantini, SH, MH	S2	Pembina (IV/a)
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	I Made Surtipta, SE, M.Si	S2	Pembina (IV/a)

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan





Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Struktural Sebagai Berikut :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan Sekretariat Dewan;
- b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, bidang umum dan urusan rumah tangga, tata usaha, kepegawaian, humas, protokol, keuangan, dan perbekalan DPRD;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pelayanan, persidangan, keuangan, perundang-undangan dan dokumentasi sekretariat DPRD dengan instansi terkait;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi, bidang penganggaran dan pengawasan;
- e. mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan program sekretariat DPRD;
- f. membina dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program sekretariat DPRD;
- g. menginventarisasi permasalahan sekretariat DPRD dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tugas administrasi umum, kepegawaian, humas dan protokol serta melakukan pembinaan pegawai pada Setwan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyiapkan fasilitas rapat-rapat bagi DPRD dan Setwan;
- c. menyiapkan alat kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD;
- d. menyelenggarakan pengurusan terhadap rumah jabatan, Gedung, Mes DPRD, Kendaraan Dinas dan Barang Inventaris lainnya;
- e. menyusun kegiatan dibidang media masa, pengolahan data, informasi dan protokoler;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;



- i. menginventarisasi permasalahan bagian umum dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan tata usaha dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku ;
- b. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan data kepegawaian;
- c. menyusun bahan administrasi penerapan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
- d. menganalisis dokumen administrasi tata usaha serta pengelolaan surat menyurat lingkup sekretariat DPRD;
- e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku ;
- f. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
- g. mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian dilingkungan kerjanya untuk terciptanya sinkronisasi dan keharmonisan kerja
- h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian tata usaha dan kepegawaian serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan ; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. melaksanakan koordinasi dan pelayanan administratif dibidang keuangan;
- c. menyusun rencana anggaran belanja dan kebutuhan Sekretariat dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mengurus administrasi keuangan keperluan Sekretariat dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. menghimpun dan meneliti administrasi keuangan serta gaji Sekretariat dan DPRD berdasarkan ketentuan yang berlaku agar administrasi berjalan benar;
- f. melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan Setwan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;



- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan bagian keuangan dan mengupayakan alternatif pemecahannya.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Kepala Bagian Fasilitas Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan dokumentasi dan informasi produk hukum;
- c. menelaah dan mengkaji rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya;
- d. menyusun dan mendistribusikan bahan-bahan rapat/sidang;
- e. menyusun resume, notulen dan risalah rapat/sidang;
- f. menginventarisasi, mengumpulkan, menghimpun data dan menggandakan peraturan perundang-undangan;
- g. memfasilitasi pengaduan aspirasi masyarakat kepada DPRD dan memfasilitasi rapat dengar pendapat;
- h. memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi pokok pikiran DPRD;
- i. memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi KUA PPAS;
- j. memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD/APBDP;
- k. memverifikasi mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan Perda Pertanggungjawaban Keuangan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karir ;
- o. menginventarisasi permasalahan bagian fasilitas pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan



- q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Secara eksternal, implementasi kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja menuntut Sekretariat DPRD untuk semakin adaptif, profesional, dan responsif. Di sisi lain, secara internal masih terdapat berbagai keterbatasan yang perlu mendapat perhatian guna meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan hasil identifikasi, isu-isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan antara lain:

1. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.

Masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas ASN, baik dalam aspek teknis persidangan, perancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan, kehumasan, maupun penguasaan teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya kualitas pelayanan administratif dan fasilitasi kepada DPRD.

2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Keterbatasan fasilitas penunjang seperti perangkat dokumentasi, ruang rapat yang representatif, serta sarana pendukung kegiatan kedewanan lainnya berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas DPRD.

3. Hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi dalam APBD.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah, skala prioritas pembangunan, serta sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian strategis yang perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan program dan kegiatan yang terarah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah



terkait, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan baik di Kabupaten Tabanan

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.5. Sistematika

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreements*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi



perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I–PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Ssistematika

BAB II–PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtiar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III–AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV–PENUTUP

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Bupati Tabanan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung-jawaban. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merupakan Rencana Induk yang komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan akan mencapai misi dan tujuannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tabanan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tabanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka Visi dan Misi RPJMD Periode 2021-2026 adalah :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)”

Makna Tabanan Aman Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya kesejahteraan masyarakat dengan menjamis rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang topang oleh penguasaan srada, ilmu dan teknologi yang berperadaban. Dalam Visi tersebut ada 3 (tiga) Dimensi Utama yaitu :

- a. Dimensi pertama terpeliharanya keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan bali (genuine bali)
- b. Dimensi kedua terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Dimensi ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif



maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan dengan Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
2. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tabanan mengemban Misi 2 yaitu **“Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)”**. Tujuan yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah **“Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)”**

Adapun sasaran dari tujuan diatas sesuai RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 adalah sasaran 2 yaitu

Sasaran 2 : “Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan memiliki tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan daerah dengan Indikator Persentase Sinkronisasi Pokok- Pokok Pikiran DPRD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan memiliki sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya Fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD”** dengan indikator sasaran Prosentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi

Tujuan 2 Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD dengan Indikator Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan memiliki sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”** dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.



Tabel 2.1
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan

Visi: Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madan (AUM)				
Misi: Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)				
Tujuan 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang Kehidupan				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	
1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Program/Rencana Kerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran. Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun 2025 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 - 2026. Adapun Renja 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	90%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%



					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
					Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Presentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	80%
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerinah	80%
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%

Indikator Kinerja Utama

Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tentu mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanat dengan pemberi amanat, sebagai dasar penilaian keberhasilan/



kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dengan sanksi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan melaksanakan dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan kedua program tersebut dilaksanakan dengan belanja operasi dan belanja modal, sebagaimana penetapan kinerja terlampir

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

INDIKATOR	Definisi Operasional / Sumber Data Target Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase sinkronisasi prioritas Pembangunan Daerah terhadap pokok – pokok pikiran DPRD	Jumlah Pokir DPRD yang Sinkron terhadap Prioritas Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Pokir seluruhnya dikali 100 persen	NA	30%	50%	70%	80%	90%
Persentase pengawasan, penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	Jumlah Pengawasan, Penganggaran, dan Produk Hukum yang terfasilitasi dibagi Jumlah seluruh Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Nilai LKJIP	Nilai LKJIP	84,78	A	A	A	A	A



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Tabanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah Pokir DPRD yang Sinkron terhadap Prioritas Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Pokir Seluruhnya dikali 100 persen	80%
2.	Meningkatnya Fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terasilitasi	Jumlah Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terasilitasi dibagi Jumlah Seluruh Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum dikali 100 persen	90 %
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	88,00 A
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	Penilaian MenPANRB	86,00 A



Tabel 2.5.
Program dan Indikator dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	Jumlah perda, ranperda, reses, risalah yang terlaksana dibagi jumlah seluruh perda, ranperda, reses dan risalah dikali 100%	90%	37.184.765.500
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD dibagi jumlah seluruh administrasi perkantoran dikali 100%	100%	59.624.685.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Adapun hasil pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Sasaran	Capaian Tahun 2024	Indikator Kinerja				Target Akhir Tahun Renstra
			Uraian	Target 2025	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	80%	Persentase Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	80%	80%	100%	90%
2	Meningkatnya Fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	90%	Persentase pengawasan penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	90 %	90%	100%	90%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di OPD	76,83B	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	88,00 A	88,61 A	100%	90,05AA
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	73,50 BB	Nilai LKJIP	86,00 A	-	-	86,50A

Berdasarkan tabel di atas, kinerja organisasi diarahkan pada empat sasaran strategis utama. Pada sasaran meningkatnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah, indikator persentase sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD terhadap prioritas pembangunan daerah ditargetkan sebesar 80% pada tahun 2025, dengan target akhir Renstra sebesar 90%. Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, ditetapkan indikator persentase pengawasan, penganggaran, dan produk hukum yang terfasilitasi dengan target 90% pada tahun 2025 dan tetap dipertahankan hingga akhir periode Renstra. Pada aspek tata kelola pemerintahan, sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah di OPD diukur melalui hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan target nilai 88,00



(predikat A) pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 90,05 (predikat AA) pada akhir Renstra. Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, indikator yang digunakan adalah Nilai LKjIP dengan target 86,00 (predikat A) pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 86,50 pada akhir Renstra.

B. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Capaian kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025

No	Program	Indikator	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	90%	90%	100%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.2 secara umum pelaksanaan program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, indikator yang digunakan adalah persentase Perda, Ranperda, reses, dan risalah yang dapat terlaksana. Dari target yang ditetapkan sebesar 90%, realisasi yang dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 111,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD mampu memberikan dukungan administratif dan teknis secara optimal terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi DPRD.

Sementara itu, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator yang diukur adalah persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan target sebesar 100%, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dukungan administratif, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana perkantoran telah berjalan secara optimal dalam



menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Secara keseluruhan, capaian kedua program tersebut mengindikasikan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah melaksanakan program dan kegiatan secara efektif sehingga mampu mendukung kinerja DPRD pada tahun anggaran 2025.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	94,51%	94,51%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	673 Orang/bulan	89,02%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	100%	111,11%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	100%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	100%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	105,55%	117,29%
Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Mebel	90%	100%	111,11%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100%	111,11%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	100%	125%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	100%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	40 Orang	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	100%	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	3 Laporan	100%
Program Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana	90%	90%	100%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	80%	70%	87,5%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	12 Dokumen	60%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%	100%	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 dokumen	3 dokumen	100%
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerinah	80%	100%	125%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	100%	125%
Pedalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	77 Dokumen	77 Dokumen	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	10 orang	100%
Penyediaan tenaga ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	3 orang	3 orang	100%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%	95,14%	105,71%
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses DPRD	720 lokasi	685 lokasi	95,14%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	100%	125%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menunjukkan hasil yang baik dengan mayoritas indikator mencapai 100%. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh komponen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa, serta pemeliharaan barang milik daerah terealisasi sesuai target. Dokumen perencanaan dan evaluasi



tersusun tepat waktu, hak keuangan ASN dan DPRD tersalurkan sesuai ketentuan, serta sarana dan prasarana perkantoran tersedia dan terpelihara secara optimal sehingga mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, capaian kinerja juga sangat optimal. Seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran (KUA-PPAS, APBD dan perubahannya, serta pertanggungjawaban APBD), pelaksanaan fungsi pengawasan di berbagai bidang, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tenaga ahli, publikasi dan dokumentasi, serta fasilitasi koordinasi dan konsultasi terlaksana dengan baik. Namun demikian, terdapat dua kegiatan yang belum mencapai target maksimal, yaitu fasilitasi penyusunan naskah akademik yang terealisasi 1 dari 2 dokumen (50%) serta pelaksanaan reses yang terealisasi 685 lokasi dari target 720 lokasi (95,14%).

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah mampu melaksanakan fungsi penunjang dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD secara efektif. Capaian yang belum optimal akan dijadikan bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi	100%	100%	100%	100%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	700 Orang/bulan	756 Orang/bulan	673 Orang/bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	100%	90%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	90 Paket	90 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	80 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	90 Paket	90 Paket
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	105,55%	90%	105,55%
Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya kebutuhan Mebel	90%	100%	90%	100%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100%	90%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%	100%	80%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	80 Unit	80 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana	90%	90%	90%	90%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	80%	41,67%	80%	70%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	5 Dokumen	20 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%	100%	100%	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan	80%	80%	80%	100%



Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	penyelenggaraan pemerintah				
Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%	80%	80%	100%
Pedalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	77 Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen	77 Dokumen
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
Penyediaan tenaga ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%	90%	90%	95,14%
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses DPRD	720 lokasi	470 lokasi	720 lokasi	685 lokasi
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%	80%	80%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025, secara



umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang baik pada hampir seluruh indikator di kedua tahun tersebut. Administrasi perkantoran, perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan aset, serta layanan keuangan dan administrasi DPRD seluruhnya terealisasi sesuai target.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdapat peningkatan kinerja pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pembahasan rancangan peraturan daerah meningkat dari 5 dokumen (2024) menjadi 12 dokumen (2025), meskipun masih belum mencapai target 20 dokumen. Fasilitas penyusunan naskah akademik juga mengalami perbaikan dari tidak terealisasi pada tahun 2024 menjadi 1 dokumen pada tahun 2025. Selain itu, pelaksanaan reses mengalami peningkatan signifikan dari 470 lokasi pada tahun 2024 menjadi 685 lokasi pada tahun 2025 dari target 720 lokasi, sehingga persentase penyerapan aspirasi masyarakat meningkat menjadi 95,14%.

Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada pelaksanaan fungsi legislasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, sementara fungsi penganggaran, pengawasan, serta dukungan administrasi tetap terjaga optimal. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara berkelanjutan.



Tabel 3.4
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	86,00A	-	-	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.488.150.000,00	54.665.814.193,00	88,90%
							1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.672.000,00	73,44%
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.227.500,00	74,25%
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.444.500,00	72,23%
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.358.384.000,00	5.855.777.489,00	79,58%
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.355.384.000,00	5.853.828.989,00	79,59%
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	1.948.500,00	64,95%
							3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.720.665.000,00	1.353.901.943,00	78,68%
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	23.942.753,00	79,81%
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000,00	46.867.663,00	85,21%
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.315.638.500,00	1.022.991.904,00	77,76%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.026.500,00	62.621.689,00	71,96%



							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	133.000.000,00	110.180.000,00	82,84%
							Penyediaan Bahan/Material	95.000.000,00	82.898.235,00	87,26%
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.399.699,00	87,99%
						4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.146.000,00	708.481.500,00	96,64%
							Pengadaan Mebel	216.952.400,00	199.381.500,00	91,90%
							Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	516.193.600,00	509.100.000,00	98,63%
						5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.219.000.000,00	3.701.272.776,00	87,73%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000,00	60.000.000,00	96,77%
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.000.000,00	194.826.961,00	75,81%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.900.000.000,00	3.446.445.815,00	88,37%
						6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.537.253.000,00	6.273.924.806,00	95,97%
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.000.000,00	349.861.851,00	81,36%
							Pemeliharaan Mebel	32.000.000,00	30.547.200,00	95,46%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.000.000,00	130.276.434,00	84,05%
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.920.253.000,00	5.763.239.321,00	97,35%
						7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40.694.040.000,00	36.570.507.679,00	89,87%



								Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.071.040.000,00	36.046.918.695,00	89,96%
								Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	473.000.000,00	471.164.984,00	99,61%
								Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	52.424.000,00	34,95%
							8	Layanan Administrasi DPRD	220.662.000,00	198.276.000,00	89,86%
								Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	220.662.000,00	198.276.000,00	89,86%
2	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Presentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	90%	90%	100%	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.884.065.000,00	22.704.381.828,00	95,06%
							1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	347.000.000,00	166.775.448,00	48,06%
								Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	95.000.000,00	86.248.977,00	90,79%
								Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	240.000.000,00	74.782.221,00	31,16%
								Penyusunan Tata Tertib DPRD	12.000.000,00	5.744.250,00	47,87%
							2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	242.000.000,00	193.192.784,00	79,83%
								Pembahasan KUA dan PPAS	22.000.000,00	15.246.936,00	69,30%
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.000.000,00	11.848.754,00	53,86%
								Pembahasan APBD	90.000.000,00	77.769.414,00	86,41%
								Pembahasan APBD Perubahan	90.000.000,00	72.797.954,00	80,89%
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	18.000.000,00	15.529.726,00	86,28%



							3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.000.000,00	41.574.206,00	41,57%
								Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	25.000.000,00	12.551.427,00	50,21%
								Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	25.000.000,00	8.026.093,00	32,10%
								Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000.000,00	11.916.593,00	47,67%
								Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	25.000.000,00	9.080.093,00	36,32%
							4	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.583.452.000,00	4.447.625.822,00	97,04%
								Pendalaman Tugas DPRD	2.408.452.000,00	2.292.165.072,00	95,17%
								Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00%
								Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%
								Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.335.000.000,00	1.315.460.750,00	98,54%
							5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.340.000.000,00	5.689.396.470,00	89,74%
								Pelaksanaan Reses	6.340.000.000,00	5.689.396.470,00	89,74%
							6	Fasilitasi Tugas DPRD	12.271.613.000,00	12.165.817.098,00	99,14%
								Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.271.613.000,00	12.165.817.098,00	99,14%
								J U M L A H	85.372.215.000,00	77.370.196.021,00	90,63%

Berdasarkan Tabel diatas, secara umum pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, meskipun masih terdapat variasi tingkat realisasi antar program dan sub kegiatan.



1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”

Sasaran strategis ini ditujukan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Indikator yang digunakan adalah Nilai LKJIP dengan target sebesar 86,00 (Kategori A). Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.488.150.000,00 dan realisasi sebesar Rp54.665.814.193,00 atau 88,90%. Tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup optimal dalam menunjang operasional perangkat daerah.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”

Sasaran ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Indikator yang digunakan adalah persentase pengawasan, penganggaran, dan produk hukum yang terfasilitasi dengan target 90%. Sasaran ini didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.884.065.000,00 dan realisasi sebesar Rp22.704.381.828,00 atau 95,06%. Tingkat serapan yang tinggi mencerminkan efektivitas dukungan sekretariat terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD, termasuk fasilitasi rapat, reses, peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta penyusunan produk hukum daerah.

Secara keseluruhan, total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebesar Rp85.372.215.000,00 terealisasi Rp77.370.196.021,00 atau 90,63%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, meskipun masih diperlukan evaluasi pada beberapa kegiatan dengan tingkat realisasi yang relatif lebih rendah guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.



C. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	90%	90%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	86,00A	-	-

Berdasarkan tabel tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan pertama yaitu Meningkatkan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dengan sasaran Meningkatkan Fasilitas Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD yang diukur melalui indikator Persentase Pengawasan, Penganggaran, dan Produk Hukum yang Terfasilitasi dengan target sebesar 90%, telah terealisasi sebesar 90% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD telah mampu memfasilitasi secara optimal seluruh pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD.

Tujuan kedua yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD dengan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD yang diukur melalui indikator Nilai LKJIP dengan target 86,00 (Kategori A), nilai LKJIP tahun 2025 belum ada sehingga belum bisa disajikan dalam laporan ini. Secara keseluruhan, tercapainya seluruh indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah berjalan efektif dan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



Tabel 3.6
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025, 2024, dan 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			Tahun 2024			Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	90%	90%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	86,00A	-	-	86,00A	73,50 BB	85,46%	85,50A	72,15 BB	84,39%



Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025		2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	84,78 A	62,70 B	85,00 A	67,56 B	85,50 A	72,15 BB	86,00 A	73,50 BB	86,50 A	-	86,50A

Berdasarkan table 3.6 dan 3.7 dapat disampaikan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan berhasil dicapai sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah. Pada tujuan pertama yaitu **“Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah”** dengan sasaran **“Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”**, indikator ditetapkan sebesar 90% setiap tahun sejak 2021 hingga 2026. Realisasi pada masing-masing tahun mencapai 90%, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD mampu mendukung dukungan terhadap fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD dari tahun ke tahun.



Selanjutnya, pada tujuan kedua yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD**” dengan sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD**”, target yang ditetapkan setiap tahun berada pada predikat A dengan tren peningkatan dari 84,78 pada tahun 2021 menjadi 86,50 pada tahun 2025–2026. Namun realisasi menunjukkan peningkatan bertahap dari nilai 62,70 dengan predikat B pada tahun 2021, menjadi 67,56 (B) pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 72,15 (BB) pada tahun 2023 dan 73,50 (BB) pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam sistem akuntabilitas kinerja, meskipun belum sepenuhnya mencapai target predikat A.

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD dengan Standar Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kabupaten Tabanan	Capaian		
				Kab/Kota Lain	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	84,94	Kabupaten Jembrana 78,95	92,05	-



D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun belum optimalnya pencapaian kinerja, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain :

a. Dukungan Administratif

Fasilitasi rapat, pembahasan ranperda, pembahasan APBD, serta kegiatan pengawasan dilaksanakan secara terjadwal dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung capaian indikator 100%.

b. Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Tingkat penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan pengendalian pelaksanaan kegiatan berjalan baik, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

2. Analisis Faktor Penghambat (Kendala yang Dihadapi)

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, meskipun target kinerja telah tercapai, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas kinerja ke depan, yaitu:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah dan kompetensi SDM pada beberapa bagian belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja yang cukup tinggi, terutama dalam mendukung kegiatan persidangan, penyusunan produk hukum, serta penyusunan laporan kinerja dan keuangan.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Beberapa fasilitas pendukung kegiatan rapat, dokumentasi, serta pengelolaan arsip dan data masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kelengkapan maupun keterbaharuan.

3. Solusi dan Upaya Perbaikan yang Dilakukan

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja serta mengatasi faktor penghambat yang dihadapi, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah dan akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan pemberdayaan SDM yang Ada

Dilakukan pembagian tugas yang lebih proporsional antar pegawai serta pegawai yang memiliki kompetensi tertentu diberdayakan secara maksimal untuk mendukung kegiatan.



b. Pengusulan Kebutuhan SDM Secara Bertahap

Kebutuhan tambahan pegawai atau tenaga pendukung diusulkan melalui mekanisme perencanaan kepegawaian sesuai kemampuan daerah, dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

c. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Secara Prioritas

Perbaikan dan pengadaan fasilitas rapat, perangkat dokumentasi, serta perlengkapan administrasi dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Fokus utama adalah memastikan sarana yang ada tetap berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin.

E. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya, khususnya anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabana dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Perbandingan antara Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	90%	88,90%	11,10%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	-	95,06%	4,94%

Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD telah mengefisiensi anggaran dalam 2 Program yang dilaksanakan yaitu sebesar 9,37% atau sebesar Rp.8.002.018.979,00 dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp.85.372.215.000,00. Tingkat efisiensi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Indikator	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Rp.61.488.150.000	Rp.54.665.814.193	Rp.6.822.335.807
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda, Ranperda, reses, risalah dapat terlaksana	Rp.23.884.065.000	Rp.22.704.381.828	Rp.1.179.683.172
JUMLAH			Rp.85.372.215.000	Rp.77.370.196.021	Rp.8.002.018.979

Berdasarkan tabel diatas efisiensi, pelaksanaan program di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp61.488.150.000 dan realisasi sebesar Rp54.665.814.193, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp6.822.335.807. Efisiensi ini diperoleh tanpa mengurangi capaian indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan administrasi, layanan keuangan, kepegawaian, serta pemeliharaan sarana prasarana dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengendalian belanja yang baik.

Selanjutnya, pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dengan anggaran sebesar Rp23.884.065.000 dan realisasi sebesar Rp22.704.381.828, terdapat efisiensi sebesar Rp1.179.683.172. Meskipun terdapat sisa anggaran, seluruh kegiatan tetap terlaksana sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dapat dicapai secara efektif dengan pengelolaan anggaran baik. Secara keseluruhan, dari total anggaran Rp85.372.215.000 dengan realisasi Rp77.370.196.021, terdapat efisiensi sebesar Rp8.002.018.979. Capaian ini mencerminkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kualitas output serta memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.



F. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran organisasi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional Sekretariat DPRD melalui kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, perencanaan, kepegawaian, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai memastikan seluruh agenda DPRD dapat difasilitasi tepat waktu. Tanpa dukungan program ini, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak akan berjalan optimal. Efisiensi anggaran yang tetap menghasilkan output maksimal menunjukkan bahwa program ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini secara langsung berkaitan dengan sasaran meningkatnya fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Melalui kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah, Pelaksanaan Reses, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Pembahasan Kebijakan Anggaran, sasaran dapat tercapai. Program ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencapaian persentase pengawasan, penganggaran, dan produk hukum yang terfasilitasi sesuai target.



Tabel 3. 11
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	No	Program/Kegiatan/	Indikator	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	86,00A	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%
					1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	100%
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
					3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	90%
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%
					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80%



						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
					8	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	100%
2	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Presentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	90%	B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda, Ranperda, Reses, Risalah dapat terlaksana	90%
					1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	80%
					2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	100%
					3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerinah	80%



					4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	80%
					5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	90%
					6	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	80%



3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2025, dimana Realisasi anggaran secara total yang telah direalisasikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sampai tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kab. Tabanan

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI	%	REALISASI TAHUN 2024
			Per		
			31-Des-2025		
1	BELANJA DAERAH	85.372.215.000,00	77.370.196.021,00	90,63%	81.849.179.602,00
4.1.	BELANJA OPERASI	78.714.620.400,00	70.894.475.200,00	90,07%	78.026.003.952,00
4.1.1.	Belanja Pegawai	47.372.424.000,00	41.854.907.684,00	88,35%	39.642.890.697,00
4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.342.196.400,00	29.093.567.516,00	92,83%	38.383.113.255,00
4.2.	BELANJA MODAL	6.657.594.600,00	6.475.720.821,00	97,27%	3.823.175.650,00
4.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	737.341.600,00	712.481.500,00	96,63%	587.180.000,00
4.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.920.253.000,00	5.763.239.321,00	97,35%	3.235.995.650,00
	SURPLUS/DEFISIT	(85.372.215.000,00)			(81.849.179.602,00)
	SISA LEBIH PEMBIYAAAAN ANGGARAN (SILPA)	-	(8.002.018.979,00)		(6.089.247.158,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat komposisi Belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Belanja dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.372.215.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.370.196.021,00 atau 90,63%. Belanja tersebut terbagi atas Belanja Operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 78.714.620.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 70.894.475.200,00 atau 90,07% dan Belanja Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.657.594.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.475.720.821,00 atau 97,27%.



Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.488.150.000,00	54.665.814.193,00	88,90%	6.822.335.807,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.672.000,00	73,44%	1.328.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.227.500,00	74,25%	772.500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.444.500,00	72,23%	555.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.358.384.000,00	5.855.777.489,00	79,58%	1.502.606.511,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.355.384.000,00	5.853.828.989,00	79,59%	1.501.555.011,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000,00	1.948.500,00	64,95%	1.051.500,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.720.665.000,00	1.353.901.943,00	78,68%	366.763.057,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	23.942.753,00	79,81%	6.057.247,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000,00	46.867.663,00	85,21%	8.132.337,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.315.638.500,00	1.022.991.904,00	77,76%	292.646.596,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.026.500,00	62.621.689,00	71,96%	24.404.811,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	133.000.000,00	110.180.000,00	82,84%	22.820.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	95.000.000,00	82.898.235,00	87,26%	12.101.765,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.399.699,00	87,99%	600.301,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.146.000,00	708.481.500,00	96,64%	24.664.500,00
	Pengadaan Mebel	216.952.400,00	199.381.500,00	91,90%	17.570.900,00
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	516.193.600,00	509.100.000,00	98,63%	7.093.600,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.219.000.000,00	3.701.272.776,00	87,73%	517.727.224,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000,00	60.000.000,00	96,77%	2.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.000.000,00	194.826.961,00	75,81%	62.173.039,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.900.000.000,00	3.446.445.815,00	88,37%	453.554.185,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.537.253.000,00	6.273.924.806,00	95,97%	263.328.194,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.000.000,00	349.861.851,00	81,36%	80.138.149,00
	Pemeliharaan Mebel	32.000.000,00	30.547.200,00	95,46%	1.452.800,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.000.000,00	130.276.434,00	84,05%	24.723.566,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.920.253.000,00	5.763.239.321,00	97,35%	157.013.679,00
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40.694.040.000,00	36.570.507.679,00	89,87%	4.123.532.321,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.071.040.000,00	36.046.918.695,00	89,96%	4.024.121.305,00



	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	473.000.000,00	471.164.984,00	99,61%	1.835.016,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	52.424.000,00	34,95%	97.576.000,00
8	Layanan Administrasi DPRD	220.662.000,00	198.276.000,00	89,86%	22.386.000,00
	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	220.662.000,00	198.276.000,00	89,86%	22.386.000,00
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.884.065.000,00	22.704.381.828,00	95,06%	1.179.683.172,00
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	347.000.000,00	166.775.448,00	48,06%	180.224.552,00
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	95.000.000,00	86.248.977,00	90,79%	8.751.023,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	240.000.000,00	74.782.221,00	31,16%	165.217.779,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	12.000.000,00	5.744.250,00	47,87%	6.255.750,00
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	242.000.000,00	193.192.784,00	79,83%	48.807.216,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	22.000.000,00	15.246.936,00	69,30%	6.753.064,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.000.000,00	11.848.754,00	53,86%	10.151.246,00
	Pembahasan APBD	90.000.000,00	77.769.414,00	86,41%	12.230.586,00
	Pembahasan APBD Perubahan	90.000.000,00	72.797.954,00	80,89%	17.202.046,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	18.000.000,00	15.529.726,00	86,28%	2.470.274,00
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.000.000,00	41.574.206,00	41,57%	58.425.794,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	25.000.000,00	12.551.427,00	50,21%	12.448.573,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	25.000.000,00	8.026.093,00	32,10%	16.973.907,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000.000,00	11.916.593,00	47,67%	13.083.407,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	25.000.000,00	9.080.093,00	36,32%	15.919.907,00
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.583.452.000,00	4.447.625.822,00	97,04%	135.826.178,00
	Pendalaman Tugas DPRD	2.408.452.000,00	2.292.165.072,00	95,17%	116.286.928,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00%	0,00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%	0,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.335.000.000,00	1.315.460.750,00	98,54%	19.539.250,00
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.340.000.000,00	5.689.396.470,00	89,74%	650.603.530,00
	Pelaksanaan Reses	6.340.000.000,00	5.689.396.470,00	89,74%	650.603.530,00
6	Fasilitasi Tugas DPRD	12.271.613.000,00	12.165.817.098,00	99,14%	105.795.902,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.271.613.000,00	12.165.817.098,00	99,14%	105.795.902,00
J U M L A H		85.372.215.000,00	77.370.196.021,00	90,63%	8.002.018.979,00

Pencapaian kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan diukur dengan indikator masukan, keluaran dan hasil adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 74,25%;
2. Pencapaian sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 72,23%;
3. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 79,59%;



4. Pencapaian sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 64,95%
5. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 79,81%;
6. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 85,21%;
7. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tahun 2024 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 77,76%;
8. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan barang penggandaan tahun 2024 untuk masukan dana adalah 100 % untuk keluaran dan hasil mencapai 71,96%;
9. Pencapaian sub kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 82,84%;
10. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 87,26%;
11. Pencapaian sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD untuk masukan dana adalah 100%, keluaran dan hasil mencapai 87,99%;
12. Pencapaian sub kegiatan Pengadaan Mebel 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 91,90%
13. Pencapaian sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 98,63%;
14. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 96,77%;
15. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 75,81%;
16. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2025 masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 88,37%;
17. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau lapangan tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 81,36%;
18. Pencapaian sub kegiatan Pemeliharaan Mebel tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 95,46%;
19. Pencapaian sub kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 84,05%;
20. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 97,35%;
21. Pencapaian sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 89,96%;
22. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 99,61%;
23. Pencapaian sub kegiatan Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD tahun 2025



- untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 34,95%;
24. Pencapaian sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 89,86%;
 25. Pencapaian sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 90,79%;
 26. Pencapaian sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan Keterangan Naskah Akademik tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100 % untuk keluaran dan hasil sebesar 31,16%;
 27. Pencapaian sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100 % untuk keluaran dan hasil mencapai 47,87%;
 28. Pencapaian sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 69,30%;
 29. Pencapaian sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 53,86%
 30. Pencapaian sub kegiatan Pembahasan APBD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 86,41%;
 31. Pencapaian sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 80,89%;
 32. Pencapaian sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 86,28%;
 33. Pencapaian sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum tahun 2025 masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 50,21%;
 34. Pencapaian sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur tahun 2025 masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 32,10%;
 35. Pencapaian sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 47,67%;
 36. Pencapaian sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian tahun 2025 masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 36,32%;
 37. Pencapaian sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 95,17%;
 38. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 100,00%;
 39. Pencapaian sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 100,00%;
 40. Pencapaian sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD tahun 2025 100% untuk keluaran dan hasil mencapai 98,54%;
 41. Pencapaian sub kegiatan Pelaksanaan Reses tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100%, untuk keluaran dan hasil mencapai 89,74%;
 42. Pencapaian sub kegiatan Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD tahun 2025 untuk masukan dana adalah 100% untuk keluaran dan hasil mencapai 99,14%.



Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan telah melaksanakan program – program untuk mencapai terwujudnya motivasi kerja anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Rapat-rapat
Sekretariat DPRD Kab. Tabanan

No	Kegiatan Rapat	Jumlah	%
1.	Rapat Paripurna Intern	22	20,37
2.	Rapat Paripurna Biasa	18	16,67
3.	Rapat Paripurna Istimewa	2	1,85
4.	Rapat Badan Musyawarah	12	11,11
5.	Rapat Badan Anggaran	10	9,26
6.	Rapat Badan Kehormatan	0	0,00
7.	Rapat Badan Pembentukan Perda	2	1,85
8.	Rapat Panitia Khusus	10	9,26
9.	Rapat Kerja (Pansus dan Eksekutif)	10	9,26
10.	Rapat Dengar Pendapat	19	17,59
11.	Rapat Aspirasi	0	0,00
12.	Rapat Gabungan	3	2,78
	J u m l a h	108	100

Dari kegiatan rapat yang diselenggarakan diatas, dihasilkan sebanyak 25 Keputusan DPRD Kabupaten Tabanan, 8 Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tabanan, dan 12 Peraturan Daerah. Rincian keputusan Pimpinan DPRD tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025

Tabel 3.15

No	Tanggal Keputusan	Nomor	Tentang	Ket
1	2	3	4	5
1	13 Maret 2025	1	Penunjukan Komisi-Komisi Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024	
2	8 April 2025	2	Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2024	
3	7 Mei 2025	3	Pembentukan Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah	



			Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029	
4	17 Juni 2025	4	Penunjukan Badan Anggaran Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
5	17 Juni 2025	5	Pembentukan Panitia Khusus II Pembahas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah	
6	17 Juni 2025	6	Pembentukan Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2024-2044	
7	8 Juli 2025	7	Persetujuan Terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah	
8	14 Agustus 2025	8	Penunjukan Badan Anggaran Pembahas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025	
9	9 September 2025	9	Penunjukan Badan Anggaran Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
10	9 September 2025	10	Pembentukan Panitia Khusus IV Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	
11	9 September 2025	11	Pembentukan Panitia Khusus V Pembahas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah	
12	18 September 2025	12	Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah	
13	18 September 2025	13	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah	
14	6 Oktober 2025	14	Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan	
15	6 Oktober 2025	15	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Badan Anggaran	



			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan	
16	6 Oktober 2025	16	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan	
17	14 Oktober 2025	17	Penunjukan Badan Anggaran Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
18	14 Oktober 2025	18	Pembentukan Panitia Khusus VI Pembahas 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah	
19	14 Oktober 2025	19	Pembentukan Panitia Khusus VII Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne, Dan Mars Kabupaten Tabanan	
20	4 Nopember 2025	20	Pembentukan Panitia Khusus VIII Pembahas Perjanjian Kerjasama KSDPK Antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Pihak Ketiga Terkait Penyelenggaraan Dan Pengelolaan DTW Tanah Lot	
21	10 Nopember 2025	21	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah	
22	10 Nopember 2025	22	Persetujuan Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah	
23	23 Desember 2025	23	Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Tabanan	
24	23 Desember 2025	24	Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026	
25	23 Desember 2025	25	Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027	



Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025

Tabel 3.16

No	Tanggal Keputusan	Nomor	Tentang	Ket
1	2	3	4	5
1	5 Pebruari 2025	1	Jadwal dan Kegiatan Reses I Masa Sidang I Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2024-2025	
2	14 Juli 2025	2	Jadwal dan Kegiatan Reses II Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2024-2025	
3	14 Agustus 2025	3	Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Daerah	
4	15 Agustus 2025	4	Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 Menjadi Peraturan Daerah	
5	19 Agustus 2025	5	Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 Menjadi Peraturan Daerah	
6	7 Oktober 2025	6	Jadwal dan Kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Jabatan 2024-2025	
7	14 Oktober 2025	7	Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Menjadi Peraturan Daerah	
8	30 Desember 2026	8	Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah	

**Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025****Tabel 3.17**

No	Tanggal Perda	Nomor	Tentang	Ket
1	2	3	4	5
1	19 Agustus 2025	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
2	19 Agustus 2025	2	Penataan Banjar Dinas	
3	20 Agustus 2025	3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029	
4	25 Agustus 2025	4	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045	
5	15 Oktober 2025	5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
6	22 Oktober 2025	6	Inovasi Daerah	
7	27 Oktober 2025	7	Perusahaan Umum Daerah Sanjayaning Singasana	
8	28 Oktober 2025	8	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
9	9 Desember 2025	9	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	
10	11 Desember 2025	10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
11	16 Desember 2025	11	Penegasan Hari Lahir Ibu Kota, Himne dan Mars Kabupaten Tabanan	
12	30 Desember 2025	12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	



Untuk memberikan kondisi kerja yang nyaman untuk mendukung tugas dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Tabanan maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 telah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan dokumen kontrak yang dibuat berdasarkan peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan yang tercantum dalam dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Pengadaan barang
Sekretariat DPRD Kab. Tabanan

No	Uraian	Banyaknya
1	Alat Kantor Lainnya	
	- Papan Nama Meja	1 Buah
2	Alat Pendingin	
	- Alat Pendingin Ruangan/AC (1PK)	1 Unit
	- Alat Pendingin Ruangan/AC (1/2 PK)	1 Unit
3	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	
	- Mic Meja Rapat	50 Buah
	- HDMI Splitter	8 Buah
4	Meja Kerja Pejabat	
	- Meja Rapat (Kayu miranti, Kamper, Jati)	4 Buah
	- Meja Kerja Pejabat	1 Buah
5	Kursi Kerja Pejabat	
	- Kursi Rapat	32 Buah
6	Peralatan Studio Audio	
	- Sound System Indoor	1 Paket
7	Komputer Unit	1 Paket
	- PC All in One	2 Unit
8	Gedung dan Bangunan	
	- Pemasangan Paving Halaman Kantor	1 Paket
	- Rehab Pagar Kantor DPRD	1 Paket
	- Pembangunan Toilet Sekretariat	1 Paket
	- Rehab Interior Gedung Komisi	1 Paket
	- Rehab Toilet Ruang Fraksi	1 Paket
	- Rehab Ruang Ketua	1 Paket
	- Rehab Toilet Gedung Pleno	1 Paket
	- Konsultan Pengawasan	1 Paket
	- Konsultan Perencanaan	1 Paket



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Capaian kinerja menunjukkan bahwa seluruh indikator strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil direalisasikan sesuai target. Persentase fasilitasi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan produk hukum DPRD terealisasi secara optimal, yang mencerminkan meningkatnya kualitas dukungan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Demikian pula, nilai LKjIP sebagai indikator akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD berhasil mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja mencapai lebih dari 90% dari total pagu yang dialokasikan, dengan tingkat efisiensi anggaran yang tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target output, tetapi juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara pimpinan dan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD, perencanaan yang sistematis, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD sebagai representasi masyarakat Kabupaten Tabanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja ke depan, terutama terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja. Perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) akan terus dilakukan melalui optimalisasi manajemen kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas-tugas kesekretariatan.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang baik dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. LKjIP ini diharapkan menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik..



4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil Kinerja Capaian Sasaran tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Kinerja Capaian Sasaran pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Perlu koordinasi, pemikiran, dan komitmen dalam penyusunan perencanaan oleh Perangkat Pelaksana sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran dan komitmen Daerah untuk menyukseskan program tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai pertanggungjawaban kami terhadap kinerja kami selama tahun 2025. Kami sangat mengharapkan perhatian dari seluruh komponen yang terlibat agar perencanaan kami di tahun mendatang dapat terwujud untuk menuju Tabanan Aman Unggul dan Madani (AUM)



LAMPIRAN – LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



ប្រតិភូសភាពក្រុមការណ៍
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
 ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសភាសភាពក្រុមការណ៍
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 គណៈកម្មាធិការសភាសភាពក្រុមការណ៍
JL. GATOT SUBROTO - TABANAN, TELP (0361) 811594 – 811595
 Website : dprd-tabanan.go.id / Email : setwan.tabanan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si
Jabatan : Pjt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
 Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
 Pjt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TABANAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Pokir DPRD yang Sinkron terhadap Prioritas Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Pokir Seluruhnya dikali 100 persen	80 %
2.	Meningkatnya Fasilitasi pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi	Jumlah Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Seluruh Pengawasan, Penganggaran dan Produk Hukum dikali 100 persen	90 %
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Opd	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	88,00 A
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	Penilaian MenPANRB	86,00 A

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase perda, reses, ranperda, risalah yang terlaksana	Jumlah perda, reses, ranperda, risalah yang terlaksana dibagi jumlah seluruh perda, ranperda, reses dan risalah dikali 100%	90%	37.184.765.500
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Sekwan Tabanan)	Jumlah administrasi perkantoran yang mendukung tugas dan fungsi PD dibagi jumlah seluruh administrasi perkantoran dikali 100%	100%	59.624.685.000

Pihak Kedua
Bupati Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan

Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si



LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TABANAN

I Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Asmara Dewata	Sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan pokok – pokok pikiran DPRD	Monitoring dan evaluasi Website Asmara Dewata kepada 40 Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tabanan yang dapat mengakses Aplikasi Asmara Dewata dibandingkan jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dikalikan 100%	80 %	
2	Senja Dewata	Persentase Jumlah Kinerja DPRD yang di sajikan pada Senja Dewata	Persentase Tercapainya Target Kinerja DPRD	Jumlah Kinerja DPRD yang disajikan pada Platform di bagi Jumlah Realisasi Kinerja DPRD dikalikan 100%	50%	
				Jumlah Realisasi Kinerja DPRD dibagi Jumlah Target Kinerja DPRD di kali 100%	60%	
II Kinerja Wajib						
NO	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80 %	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	



4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagai belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

Singasana, 15 Oktober 2025
Pihak Pertama
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan,



Drs. I Made Agus Harthawiguna, M.Si



NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN/ PEMBAHASAN	KESIMPULAN	RENCANA AKSI
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp.3.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.227.500	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 74,25%	PPTK lebih memperhatikan anggaran kas
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dari target 1 Tahun sebesar Rp.2.000.000 terealisasi Rp.1.444.500	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi 72,23%	PPTK lebih memperhatikan anggaran kas
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dari target sebesar Rp.7.355.384.000 terealisasi sebesar Rp.5.853.828.989	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 79,59%	Sudah mencapai target kebutuhan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 3.000.000 sudah terealisasi sebesar Rp.1.948.500	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi 64,95%	PPTK lebih memperhatikan anggaran kas
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dari target sebesar Rp.30.000.000 terealisasi sebesar Rp.23.942.753	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 79,81%	PPTK lebih memperhatikan anggaran kas
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dari target sebesar Rp.55.000.000 terealisasi Rp.46.867.663	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 85,21%	PPTK sudah bekerja secara maksimal



		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dari target sebesar Rp.1.315.638.500 terealisasi sebesar Rp.1.022.991.904	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 77,76%	PPTK sudah berkerja secara maksimal
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dari target sebesar Rp.87.026.500 terealisasi sebesar Rp.62.621.689	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 71,96%	PPTK sudah berkerja secara maksimal
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Dari target sebesar Rp.133.000.000 terealisasi sebesar Rp.110.180.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 82,84%	Sudah mencapai target kebutuhan
		Penyediaan Bahan/ Material	Dari target sebesar Rp.95.000.000 terealisasi sebesar Rp.82.898.235	Serapan anggaran dari target terealisasi sebesar 87,26%	PPTK sudah berkerja secara maksimal
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dari target sebesar Rp.5.000.000 terealisasi sebesar Rp.4.399.699	Serapan anggaran dari target terealisasi sebesar 87,99%	PPTK sudah berkerja secara maksimal
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Dari target sebesar Rp.216.952.400 terealisasi sebesar Rp.199.381.500	Serapan anggaran dari target terealisasi sebesar 91,90%	Sudah mencapai target yang ditetapkan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dari target sebesar Rp.516.193.600 terealisasi sebesar Rp.509.100.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 98,63%	Sudah mencapai target yang ditetapkan



5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dari target sebesar Rp.62.000.000 terealisasi sebesar Rp.60.000.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 96,77%	Sudah mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dari target sebesar Rp.257.000.000 terealisasi sebesar Rp.194.826.961	Serapan anggaran dari target 1 Tahun baru terealisasi sebesar 75,81%	PPTK sudah bekerja secara maksimal
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dari target sebesar Rp. 3.900.000.000 terealisasi sebesar Rp.3.446.445.815	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 88,37%	Sudah mencapai target kebutuhan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dari target sebesar Rp. 430.000.000 terealisasi sebesar Rp.349.861.851	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 81,36%	Sudah mencapai target kebutuhan
		Pemeliharaan Mebel	Dari target sebesar Rp. 32.000.000 terealisasi sebesar Rp.30.547.200	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi 95,46%	Sudah mencapai target yang ditetapkan



		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dari target 1 Tahun sebesar Rp. 155.000.000 terealisasi sebesar Rp.130.276.434	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 84,05%	Sudah mencapai target kebutuhan
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dari target sebesar Rp.5.920.253.000 terealisasi sebesar Rp. 5.763.239.321	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 97,35%	Sudah mencapai target kebutuhan
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dari target sebesar Rp.40.071.040.000 terealisasi sebesar Rp.36.046.918.695	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 89,96%	Sudah mencapai target kebutuhan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dari target sebesar Rp. 473.000.000 terealisasi sebesar Rp. 471.164.984	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 99,61%	Sudah sesuai target yang ditetapkan
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dari target sebesar Rp. 150.000.000 terealisasi sebesar Rp. 52.424.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 34,95%	PPTK lebih mencermati anggaran kas yang telah disusun
8	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dari target sebesar Rp. 220.662.000 terealisasi sebesar Rp. 198.276.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 89,86%	Sudah sesuai target kebutuhan
9	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda	Dari target sebesar Rp. 95.000.000 terealisasi sebesar Rp. 86.248.977	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 90,79%	Sudah sesuai target kebutuhan



		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Dari target sebesar Rp.240.000.000 terealisasi sebesar Rp. 74.782.221	Serapan anggaran dari target 1 Tahun Sudah terealisasi 31,16%	Perlu adanya ketelitian dalam pemasangan anggaran
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dari target sebesar Rp. 12.000.000 Sudah terealisasi sebesar Rp.5.744.250	Serapan anggaran dari target 1 Tahun Sudah terealisasi 47,87%	Perlu adanya ketelitian dalam pemasangan anggaran
10	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	Dari target sebesar Rp. 22.000.000 terealisasi sebesar Rp. 15.246.936	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 69,30%	PPTK lebih memperhatikan anggaran kas yang disusun
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dari target sebesar Rp. 22.000.000 terealisasi sebesar Rp. 11.848.754	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 53,86%	PPTK tetap memperhatikan anggaran kas yang ada
		Pembahasan APBD	Dari target sebesar Rp. 90.000.000 terealisasi sebesar Rp. 77.769.414	Serapan anggaran dari target tahun terealisasi sebesar 86,41%	Sudah sesuai target kebutuhan
		Pembahasan APBD Perubahan	Dari target sebesar Rp. 90.000.000 terealisasi sebesar Rp. 72.797.954	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 80,89%	Sudah sesuai target kebutuhan
		Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 18.000.000 terealisasi sebesar Rp. 15.529.726	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 86,28%	Sudah sesuai target kebutuhan



11	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintah dan Hukum	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi sebesar Rp. 12.551.427	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 50,21%	PPTK lebih mencermati anggaran kas yang telah disusun
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi sebesar Rp. 8.026.093	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 32,10%	PPTK lebih mencermati anggaran kas yang telah disusun
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi sebesar Rp. 11.916.593	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 47,67%	PPTK lebih mencermati anggaran kas yang telah disusun
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 25.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.080.093	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 36,32%	PPTK lebih mencermati anggaran kas yang telah disusun
12	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Dari target sebesar Rp. 2.408.452.000 terealisasi sebesar Rp. 2.292.165.072	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 95,17%	Sudah mencapai target yang ditetapkan
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp.1.335.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.315.460.750	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 98,54%	Sudah mencapai target yang ditetapkan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp. 600.000.000 terealisasi sebesar Rp. 600.000.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 100%	Sudah mencapai target yang ditetapkan



		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp.180.000.000 terealisasi sebesar Rp. 180.000.000	Serapan anggaran dari target 1 Tahun sudah terealisasi sebesar 100%	Sudah mencapai target yang ditetapkan
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses	Dari target pada 1 Tahun sebesar Rp.6.340.000.000 terealisasi sebesar Rp. 5.689.396.470	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 89,74%	Sudah mencapai target kebutuhan
14	Fasilitas Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dari target 1 Tahun sebesar Rp.12.271.613.000 sudah terealisasi Rp.12.165.817.098	Serapan anggaran dari target 1 Tahun terealisasi sebesar 99,14%	Sudah mencapai target yang ditetapkan



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN KAS				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW2	TW3	TW4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP	2.785.000	2.215.000	0,00	0,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	5.000.000	PA
			2.477.000	523.000	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	PA
			308.000	1.692.000	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	PA
			2.093.626.408	2.154.643.292	1.620.419.350	1.489.694.950	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.304.384.000	PA
			2.092.065.408	2.154.643.292	1.618.980.350	1.489.694.950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.301.384.000	PA



			1.561.000	-	1.439.000	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	PA
			460.207.000	114.609.600	382.176.600	519.474.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah	1.720.665.000	PA
			15.000.000	15.000.000	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.000.000	PA
			14.557.700	14.001.200	13.441.600	12.999.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	55.000.000	PA
			327.939.900	244.197.20	292.786.400	450.715.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	1.315.638.500	PA
			33.604.400	17.838.400	17.800.600	17.783.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	87.026.500	PA
			33.705.000	33.370.000	33.225.000	32.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	133.000.000	PA



			32.400.000	32.400.000	24.923.000	5.277.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket/Bahan Material yang Disediakan	95.000.000	PA
			3.000.000	2.000.000	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5.000.000	
			732.396.000	0,00	0,00	750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	733.146.000	PA
			216.202.400		-	750.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	216.952.400	PA
			516.193.600	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	516.193.600	PA
			1.087.417.250	1.091.517.250	1.087.417.250	952.648.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.219.000.000	PA
			20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.000.000	PA
			64.725.000	67.325.000	64.725.000	60.225.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	257.000.000	PA



			1.002.692.250	1.004.192.250	1.002.692.250	890.423.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.900.000.000	PA
			432.916.660	5.849.974.440	143.640.000	110.721.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	6.537.253.000	PA
			122.508.100	113.500.000	109.000.000	84.991.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	430.000.000	PA
			8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32.000.000	PA
			57.120.800	53.509.200	26.640.000	17.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155.000.000	PA
			245.287.760	5.674.965.240	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.920.253.000	PA



			9.783.103.010	10.576.079.500	8.601.452.246	11.733.405.244	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	40.694.040.000	PA
			9.633.103.010	10.126.079.500	8.601.452.246	11.710.405.244	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40.071.040.000	PA
			-	450.000.000	-	23.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	473.000.000	PA
			150.000.000	-	-	-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	150.000.000	PA
			110.331.000	0,00	110.331.000	0,00	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD	220.662.000	PA
			110.331.000	-	110.331.000	-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	220.662.000	PA



2	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Presentase Pengawasan, Penganggaran dan produk hukum yang terfasilitasi	285.534.000	27.437.000	19.280.500	14.748.500	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terbentuk	347.000.000	PA
			33.534.000	27.437.000	19.280.500	14.748.500	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	95.000.000	PA
			240.000.000	-	-	-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	240.000.000	PA
			12.000.000	-	-	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang Disusun	12.000.000	PA
			46.167.600	74.571.300	82.029.000	39.232.100	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	242.000.000	PA
			-	6.190.300	15.809.700	-	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	22.000.000	PA
			-	6.190.300	15.809.700	-	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22.000.000	PA



			28.167.600	50.767.900	11.064.500	-	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	90.000.000	PA
			-	11.422.800	39.345.100	39.232.100	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	90.000.000	PA
			18.000.000	-	-	-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	18.000.000	PA
			100.000.000	0,00	0,00	0,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerinah	100.000.000	PA
			25.000.000	-	-	-	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25.000.000	PA
			25.000.000	-	-	-	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25.000.000	PA
			25.000.000	-	-	-	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000.000	PA



			25.000.000	-	-	-	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25.000.000	PA
			1.716.029.000	1.122.290.500	568.795.000	1.176.337.500	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terpenuhinya kebutuhan Bimtek DPRD, tenaga ahli DPRD dan Staf Fraksi DPRD	4.583.452.000	PA
			1.200.904.000	607.537.500	-	600.010.500	Pedalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.408.452.000	PA
			320.125.000	319.753.000	373.795.000	321.327.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.335.000.000	PA
			150.000.000	150.000.000	150.000.000	210.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	660.000.000	PA
			45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Penyediaan tenaga ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000	PA
			2.113.359.200	0,00	2.113.358.900	2.113.358.900	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	6.340.000.000	PA



			2.113.359.200	-	2.113.358.900	2.113.358.900	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	6.340.000.000	PA
			6.500.759.000	3.000.561.000	2.770.031.000	262.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terpenuhinya fasilitasi tugas DPRD	12.271.613.000	PA
			6.500.759.000	3.000.561.000	2.770.031.000	262.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.271.613.000	PA